

**MODEL PENDEKATAN NILAI DALAM MEMBENTUK  
KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (*CIVICS DISPOSITION*)  
PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Nadila Nisa Al Umami

*Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret*

*Email:nadilaalumami@student.uns.ac.id*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik khususnya dibangku sekolah menengah pertama. Berdasarkan kepada tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk *good citizen*. Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu (keterampilan) melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a) yang berani membela serta setia kepada bangsa dan Negara, b) memiliki sikap yang toleran kepada sesama, c) memeluk salah satu agama yang diakui negara, dan d) memiliki sikap demokratis. Peneliti menggunakan model variasi penanaman nilai agar terbentuknya karakter warga negara yang baik dari setiap peserta didik di jenjang sekolah menengah pertama, mempersiapkan lulusan-lulusan yang berbudi pekerti dan memiliki keterampilan kewarganegaraan yang baik dalam berpartisipasi di Masyarakat. Menggunakan metode analisis teoritis untuk menarik kesimpulan hasil dalam pendekatan model penanaman nilai yang berguna untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan. Hasil dari penelitian ini dapat kita tarik dalam satu inti *Civics Disposition* atau keterampilan warga negara yang mencerminkan *learning to do and learning to life to gether* (aspek keterampilan). Untuk itu semua maka pendekatan model penanaman nilai mampu mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di era global. Dan menghasilkan warga Negara yang diharapkan melalui PKn : (a) warga negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga negara yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan internasional.

**Kata kunci :** Civics Disposition, Model Pendekatan Nilai, Peserta didik.

**ABSTRACT**

*This study aims to improve the citizenship skills of students, especially in Junior High School. Based on the learning objective of Citizenship Education which is to establish a good citizen. Good citizens here are citizens who know(have knowledge), want(attitude), and are able (skills) to carry out daily life in a society, nation and state. Good citizens are citizens who have the following characteristics: a) who dare to defend and be loyal to the nation and state, b) have a tolerant attitude towards other, c) embrace one of the religions recognized by the state, and d) have democratic attitude. The researcher uses a variation of value planting model so that the formation of good citizenship characteristics of each student at the Junior High School prepares graduates who are virtuous and have good citizenship skills in participating in the community. Using the method of theoretucal analysis to draw conclusions from the results of the value-planting model that is useful for improving citizenship skills. We can draw the results of this research in one core civics Disposition or skills that reflect learning to do and learning to life to gether (aspect of skills). For this reason, the value –planting model approach is able to direct dynamic citizens in the face of challenges in the global era. And produce citizens who are expected through PPKn: (a) intellegent citizens, (b) citizens who have commitment, and (c) citizens who are able to engage themselves or be participatory in life in Indonesia society, nation and state and in International relations.*

**Keyword:** Civic Disposition, Value Approach, Development of Students.

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

## PENDAHULUAN

Ada istilah kewarganegaraan dan kewargaan negara. Soemantri (1967) mengatakan bahwa istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara, seperti misalnya tentang perolehan status dan kehilangan status warga negara Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 12 tahun 2006. Sementara istilah kewargaan negara merupakan terjemahan dari istilah "Civics" yaitu merupakan mata pelajaran ilmu sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (good citizen). Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu (keterampilan) melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari.

Begitu penting peranan yang dimiliki PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, maka pembelajaran PKn di sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap dan keterampilan hidup dan kehidupan yang demokratis. Semua ini dilakukan dalam rangka membangun kehidupan demokrasi sebagaimana yang diinginkan. Untuk itu sekolah harus dapat menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan warga negara yang demokratis melalui : (a) pengembangan kecerdasan yang meliputi kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan rasional (IQ) dan kecerdasan moral (MQ), (b) membentuk sikap kemauan, serta (c) melatih keterampilan untuk mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Wahab dan Sapriya (2011 : 311) mengatakan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan akademik tujuan pendidikan kewarganegaraan (civic/citizenship education) di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (to be good citizens). Segala sesuatu yang digunakan dan dilakukan guru dalam proses pembelajaran PKn hendaknya mampu membentuk dan menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik.

Winataputra dan Budimansyah (2007) berpendapat bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), memiliki keterampilan kewarganegaraan (civic skill) dan memiliki watak kewarganegaraan (civic disposition). Pendapat ini bila dikaitkan dengan taksonomi Bloom, maka memiliki pengetahuan kewarganegaraan terkait dengan aspek kognitif, memiliki watak kewarganegaraan terkait dengan aspek afektif dan memiliki keterampilan kewarganegaraan terkait dengan aspek psikomotor. Pendapat ini senada dengan pendapat Dardji Darmodiharjo (1987), yang mengatakan bahwa pendidikan memuat unsur : mengajar (pengetahuan), mendidik (membentuk sikap), dan melatih (keterampilan).

Berkaitan dengan Pendidikan Nilai tujuan utama dalam pendidikan adalah menghasilkan keperibadian manusia yang matang secara emosional, spiritual dan intelektual. Semua hal tersebut di atas nampaknya sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yakni learning to know (aspek Pengetahuan), learning to be (aspek Afektif), learning to do and learning to life to gether (aspek keterampilan). Untuk itu semua maka PKn dikembangkan agar mampu mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di era global. Warga Negara yang diharapkan melalui PKn adalah : (a) warga negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga negara yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan internasional.

Peserta didik yang menduduki bangku sekolah menengah pertama mengalami masa perkembangan transisi antara anak-anak ke remaja. Penanaman Pendekatan Nilai untuk membentuk watak peserta didik yang tertib dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. Karakter remaja sebagai berikut menurut Perkembangan Peserta Didik:

- Pada masa remaja berkembang "social cognition" (kemampuan untuk memahami orang lain), mampu menjalani hubungan sosial yang lebih akrab Berkembang sikap "conformity" yaitu kecenderungan mengikuti

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

pendapat, kebiasaan, hobi orang lain. Bila perilaku yang diimitasi positif akan menjadi positif dan sebaliknya.

- Pada remaja sering membentuk kelompok-kelompok senasib atau "gang"
- Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain.
- Perkembangan moral pada remaja banyak dipengaruhi oleh tingkat moral orang tua / keluarga. Masa remaja merupakan saat berkembangnya identity (jati diri)
- Perkembangan identity pada remaja berkaitan erat dengan komitmennya terhadap okupasi masa depan, peran masa dewasa dan sistem keyakinan pribadi.
- Identitas diri menunjuk kepada pengorganisasian atau pengaturan dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan dan keyakinan-keyakinan ke dalam citra diri secara konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan baik menyangkut pekerjaan dan falsafah hidup.

Dengan begitu peserta didik di masa Sekolah Menengah Pertama sangat baik untuk memulai penanaman nilai kewarganegaraan. Karena dengan model pendekatan penanaman nilai kita dapat mendewasakan peserta didik dengan man nilai-nilai moral yang berdasarkan sila-sila Pancasila.

#### METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data pertama, sumber bahan cetak (kepuustakaan), meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi dokumentasi, dan studi pustaka. Sementara itu proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992)

#### HASIL

Berdasarkan pada kajian literasi yang sudah diteliti. Civic Disposition yang menekan

pada pembentukan karakter warga negara. Kita perlu memperhatikan karakter peserta didik satu dengan yang lainnya. Dalam penilaian civic disposition dapat menggunakan laporan pengamatan. Walau begitu kita tetap harus men~~trait~~ peserta didik agar terbentuk karakter peserta didik yang baik dan cinta tanah air.

Sebuah laporan dari *The NAEP 1998 Civic Report Card for the Nation, U.S. Department of Education: Office of Educational Research and Improvement* menyatakan bahwa Civic Disposition lebih mengarah pada pendekatan dari karakter individu dan publik esensial untuk merepresentasikan dan menimprovisasi dari Demokrasi Konstitusional Amerika. Mencapai hal ini diidentifikasi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Menjadi masyarakat yang indepen dari masyarakat
2. Asumsi individual, politik, dan ekonomi sebagai respon dari seorang warga negara
3. Perduli individu yang membutuhkan bantuan, dan orang
4. Partisipaso dalam kewargaegaraan affairs in a informed, thought ful, and affective manner.
5. Promoting the healthy functioning of amerika constittusional demokrasi.

(Anthony D. Lutkus. Et.all 1999)

Karakter warga negara dibagi menjadi dua, karakter publik dan karakter privat yang mana dideskripsikan sebagai berikut menurut (Budimansyah, 2008)

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.

Sebagai warga negara kita perlu memiliki kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan hanya karena keterpaksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar yang dilakukan sebagai konsekuensi tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai masyarakat demokratis.

2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

Meliputi tanggung jawab terhadap keamanan diri pribadi, dan memberi perlindungan kepada keluarga. Menggunakan hak dalam pemilu merupakan salah satu contoh yang dapat

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

dilakukan sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara.

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.  
Menghormati orang lain, mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara Indonesia. Mengikuti segala aturan yang dibuat dan juga dalam menjalankan musyawarah mencapai mufakat.
4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.  
Sebagai warga negara perlu sadar terhadap informasi-informasi yang didapat jadi tidak serta merta menelan mentah-mentah. Mengikuti diskusi publik sebagai salah satu cerminan partisipasi dalam masyarakat. Evaluasi juga dapat dilakukan guna terciptanya efektifitas dalam partisipasi.
5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.  
Pada hal ini kita sebagai warga negara perlu peka dan sadar informasi dalam urusan-urusan publik, menelaah nilai-nilai yang terbangun dalam publik terhadap prinsip konstitusional dan juga perlu adanya kontrol warga negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Di Kewarganegaraan persekolahan, civic disposition perlu ditanamkan sedari peserta didik masih remaja. Melihat perkembangan peserta didik dari masa ke masa. Penerapan yang dilakukan secara dini akan menjadikan peserta didik yang cakap dan menuruti apapun yang ada di masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran yang mampu merugikan dirinya.

Dewasa ini kita dapat melihat bahwa banyak kasus yang terjadi kebanyakan para remaja melakukan kesalahan karena adanya dorongan dari lingkungannya yang menjadikan peserta didik berani untuk melakukan kejahatan di usia dini.

Emosional yang belum matang juga menantang rasa penasaran. Perlu adanya peran orang tua dan juga guru dalam menciptakan peserta didik yang baik dan mencerminkan karakter kewarganegaraan Indonesia.

Untuk menciptakan karakter warga negara dalam persekolahan guru dapat

menerapkan beberapa kegiatan dalam pembelajaran sebagai berikut:

- a) Kegiatan pembelajaran secara berkelompok dalam pertemuan di kelas, dengan mensimulasikan tentang debat pada satu isu yang ditentukan, dan simulasi lainnya yang mendukung pengembangan karakter yang sopan santun, kepewiraan, disiplin pribadi, ketekunan, kepedulian terhadap kepentingan umum dan menghormati orang lain.
- b) Proyek belajar pelayanan masyarakat, seperti membantu mengajari peserta didik yang lebih muda atas pengalaman belajar yang sudah kita kuasai. Merawat lingkungan sekolah dengan melaksanakan piket kelas sesuai jadwal dan melakukan bersih-bersih bersama warga sekolah. Kemudian akan mengembangkan karakter disiplin pribadi, tepat waktu, menghargai orang lain, santun, dsb.
- c) Kegiatan perayaan hari besar nasional dan perayaan atas prestasi teman. Hal ini diharapkan peserta didik memiliki jiwa peduli dengan sesama, menghargai perbedaan dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
- d) Diskusi-diskusi yang teratur mengenai masalah aktual dapat meningkatkan karakter kepedulian terhadap urusan publik.
- e) Kerjasama sekolah dengan institusi lain, mendatangkan tokoh masyarakat ke sekolah dan sejenisnya dapat mengembangkan kepekaan kewarganegaraan peserta didik.

Selanjutnya pendidik dapat mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mengevaluasi karakter peserta didik dalam mengembangkan karakter warga negara yang baik dan cinta tanah air.

*Zuckerman (2014) has argued that this kind of mobilization of youth's interests and identities needs to be understood on a continuum that includes "thicker" forms of civic and political engagement (e.g., leading a protest, organizing a funding drive)."*

Hari ini ilmu kewarganegaraan dan kehidupan politik hidup dalam

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

kebudayaan yang populer dan dapat dijangkau oleh setiap orang.

Udin S. Winataaputra (2001) mengatakan, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana sistemik pendidikan demokrasi. Prosi PKn sebagai pendidikan politik demokrasi lebih banyak daripada fungsinya sebagai pendidikan nilai dan moral maupun pendidikan kebangsaan. Fungsi PKn sebagai pendidikan nilai dapat kita sarikan dari pernyataan bahwa PKn berfungsi sebagai pembentukan karakter warga negara. PKn persekolahan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarater yang diamanatkan dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945.

Parker menyatakan bahwa;

*"...within and among these settings problems of common living are identified and mutual deliberation and problem-solving activity is undertaken as a routine practice of school life."*

Dalam situasi seperti ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam mendidik siswa untuk terlibat dalam memecahkan masalah termasuk masalah-masalah konflik pada kehidupan sekolah dan kehidupan sosial sehari-hari.

(Kaelan, 2000) hakekat nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Nilai tidak dapat diindera yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terdiri atas lima nilai dasar, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Apabila di analisis nilai-nilai dalam Pancasila maka didalamnya dapat berkategori dua. Pertama, nilai-nilai moral yang berhubungan dengan pribadi manusia atau hakikat kemanusiaan, yaitu dalam nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Kedua, nilai-nilai moral yang berhubungan dengan manusia dalam lingkungan hidup bersama sebagaimana tertuang dalam nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai sosial. Pengembangan dan penjabaran nilai nantinya akan menjadi bahan

materi pelajaran PKn hendak pula berpijak pada dua kartegori tersebut. Adanya nilai kemanusiaan mendorong perlunya pendidikan nilai, sedangkan PKn didasarkan atas perlunya nilai-nilai sosial bermasyarakat ditanamkan pada anak didik.

Civic Disposition di persekolahan dipergunakan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Isi dari Civic Disposition persekolahanpun berbeda disetiap jenjangnya. Pada bagian latar belakang Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, kita dapat mengidentifikasi sejumlah nilai atau karakter warga negara, yakni:

1. Memiliki semangat kebangsaan
2. Memiliki karakter demokratis
3. Memiliki kesadaran bela negara
4. Menghargai hak asasi manusia
5. Sikap menghargai kemajemukan bangsa
6. Kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup
7. Memiliki tanggung jawab sosial
8. Ketaatan pada hukum
9. Ketaatan membayar pajak
10. Sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama dimensi nilai dan sikap kewarganegaraan yang dibentuk adalah

Kelas	Semester	Dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan
VII	I	Memiliki sifat positif terhadap norma yang berlaku. Memiliki sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama Indonesia
	II	Memiliki sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM Bertanggung Jawab dalam mengemukakan pendapat
VIII	I	Memiliki sikap positif terhadap Pancasila Memiliki sikap positif terhadap

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

		UUD 1945 hasil amandemen Taat terhadap perundangan nasional	5. Pendekatan pembelajaran berbuat ( <i>action learning approach</i> )
	II	Memiliki sikap positif terhadap demokrasi Memiliki sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia	Pada lima pendekatan yang dijabarkan oleh Douglas Superkka, model pertama pendekatan nilai menjadi model yang dapat diterapkan secara efektif untuk menerapkan sikap-sikap kewarganegaraan yang menjadikan peserta didik berada, berperilaku satun, dan bermiral yang baik. Dengan memberikan pendekatan nilai dalam pembelajaran PKn peserta didik akan dapat menyesuaikan dan menerapkannya pada realitas sosial di sekolah maupun di masyarakat.
IX	I	Memiliki sikap bela negara	
	II	Memiliki sikap terhadap dampak globalisasi	

Ketika hal tersebut diterapkan kepada peserta didik, akan menciptakan kondisi yang positif. Peserta didik mampu menyaring berbagai fenomena yang ada di sekitar dan tetap bersikap baik dan patuh pada aturan normatif maupun sosial.

Penerapan model-model dalam pembelajaran memberikan suasana kelas yang berbeda. Pendidik dapat menggunakan berbagai variasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya dalam pembelajaran dalam pengetahuan saja, namun model pembelajaran juga dapat diadopsi dalam pembelajaran sikap untuk mencapai keadaan peserta didik yang cakap dan taat norma.

Nana Syaodin Sukmadinata menyatakan ada beberapa model pembelajaran yang efektif digunakan untuk pembelajaran afektif dan psikomotorik: a) Model konsiderasi, b) model pembentukan rasional, c) klarifikasi nilai, d) Pengembangan moral kognitif, e) Model nondirektif.

Pendekatan nilai menurut Douglas Superka, yaitu

1. Pendekatan nilai (*inclusion approach*)
2. Pendekatan Perkembangan moral kognitif (*values moral development approach*)
3. Pendekatan analisis nilai (*value analysis approach*)
4. Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*)

## DAFTAR PUSTAKA

## KESIMPULAN

PKn, sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting, baik di tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi dalam membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Namun, dalam masa-masa yang lalu, PKn selalu mendapat pengaruh yang kuat dari kepentingan politik, bahkan dapat dikatakan menjadi mandat politik dari penguasa saat itu, sehingga baik misi, orientasi, tujuan, dan materinya sering berubah sesuai dengan perubahan politik yang terjadi. PKn yang diharapkan saat ini perlu memperluas misinya bukan sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik. PKn pun perlu menggunakan interpretasi maksimal, yang berarti PKn mesti mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif.

Memasuki era disrupsi, penguatan nilai-nilai kewarganegaraan yang dilakukan oleh pendidik di persekolahan perlu sejalan pula dengan pemberian penguatan dari peran orang tua. Supaya peserta didik mampu bertahan ditengah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa cepatnya. Sebagai pendidikan kewarganegaraan memiliki peran besar dalam memenuhi keadaan karkter pada setiap peserta didik.

1. Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, Penialain. Jakarta. Bumi Aksara.
2. Sapriya. 2007. Perspektif Pemikiran Pakar Tentang

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

- Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. Disertasi S3 IPS. SPs UPI Bandung
3. Winataputra, Udin S. Dan Budimansyah, Dasim. 2007. *Civic education konteks, landasan, bahan ajar dan kultur kelas*. Bandung: SPS PKN UPI.
- Dokumen Negara
1. Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
- Makalah dan Jurnal:
1. Budimansyah, Dasim. 2009. Membangun karakter bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi. Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada fakultas Pendidikan IPS, UPI.
  2. Fakhruddin, Agus. 2014 Urgensi Pendidikan Nilai untuk Memecahkan Problematika Nilai dalam Konteks Pendidikan Persekolahan. UPI Bandung. Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim. Vol.12 No.1
  3. Fennimore, Beatrice S. Permission Not Required: The Power of Parents to Disrupt Educational Hypocrisy. Review of Research in Education March 2017, Vol. 41, pp. 159 –181
  4. GreGory, Anne. Eliminating Disparities in School Discipline: A Framework for Intervention. Review of Research in Education, 41
  5. Kohli, Rita. 2018. The "New Racism" of K-12 Schools: Centering Critical Research on Racism. Review of Research in Education March 2017, Vol. 41, pp. 182 –202
  6. Maftuh, Bunyamin. 2008. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Upi Bandung. EDUCATIONS: Vol II No. 2. ISSN:1907-8838
  7. Rukiyati, Sutarini. Y. Ch. Nany, Priyoyuwono, P. 2014. PENANAMAN NILAI KARAKTER TANGGUNG JAWAB DAN KERJA SAMA TERINTEGRASI DALAM PERKULIAHAN ILMU PENDIDIKAN. UNY: Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun IV, Nomor 2, Juni 2014
  8. Santoso, Slamet Sudi. 2018. Analisis Korelasi Kondisi Fisik, Lingkungan Belajar, Kecerdasan Emosi dan Spiritual terhadap Tingkat Kelulusan Ujian Teori Respirasi. UMJ: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 14, No. 2, Juli 2018
  9. Sapriya, 2010. *Membangun Body of Knowledge Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Displin ilmu Terintegrasi*. Makalah Prosiding seminar dan kongres nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa di UPI Bandung, 22-23 Desember 2010.
  10. Sauri, Sofyan. Prof. Dr. H. M.Pd. MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU BERBASIS PENDIDIKAN NILAI.
  11. Somantri, N. M. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosda Karya.
  12. StornAiuolo, Amy and Thomas, Ebony Elizabeth. 2018. Disrupting Educational Inequalities Through Youth Digital Activism
  13. Wening, Sri. 2012. PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN NILAI. UNY. Jurnal Pendidikan Karakter. No.1

